

Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja”

Irvan Nurfauzan Saputra; Azkaa Rahiila Hardi; Revo Rahmat. Universitas Pembangunan Jaya.

ABSTRACT: Religious intolerance is a discriminatory attitude or behavior perpetrated against certain religious groups. Religious intolerance can take many forms, such as physical violence, expcrimination in access to public services or employment. One of the cases of intolerance in Indulsion, humiliation, and disonesia is intolerance in Cilegon. Many religious problems have occurred in Cilegon between the majority and minority communities, such as the refusal to build another house of worship to the destruction of buildings owned by HKBP members in the PCI housing complex (Pondok Cilegon Indah). The purpose of this study is to examine the intolerance that occurs in Cilegon and find out the causes and solutions that have been made by the government and local communities. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection using literature. This approach was chosen because the aim of the research is to understand in depth the topic under study and describe the phenomena associated with the topic. Based on the findings that the author has obtained, the phenomenon of intolerance that occurs in Cilegon is based on an old grudge during the Dutch colonial period in Cilegon, namely the Cilegon Geger incident. This event was triggered by the policies of the Dutch colonialists and the prohibition of the call to prayer which then led to rebellions and in the end, many victims were dominated by the clergy. Apart from that, another factor was the agreement between the ulemas in Cilegon and the Krakatau Steel factory in 1974 which later led to the clause that there were no places of worship for religions other than Islam in Cilegon. From the discussion that the authors have explained above, it can be concluded that the sense of intolerance is still quite strong in Cilegon. Although various efforts have been made by related parties to overcome these problems, cases of intolerance are still found in this city.

KEYWORDS: Religion, Cilegon, Intolerance, Houses of Worship

ABSTRAK: Intoleransi agama adalah sikap atau perilaku diskriminatif yang dilakukan terhadap kelompok agama tertentu. Intoleransi agama dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, pengusiran, penghinaan, dan diskriminasi dalam akses ke layanan publik atau pekerjaan. Salah satu kasus intoleransi yang ada di Indonesia adalah sikap intoleransi di Cilegon. Banyak sekali permasalahan keagamaan yang terjadi di Cilegon antara umat mayoritas dan minoritas seperti penolakan pendirian rumah ibadah lain hingga pengrusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di kompleks perumahan PCI (Pondok Cilegon Indah). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang sikap intoleransi yang terjadi di Cilegon serta mencari tahu penyebab dan apa saja penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam topik yang diteliti dan menggambarkan fenomena yang terkait dengan topik tersebut. Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis dapatkan, fenomena intoleransi yang terjadi di Cilegon ini didasari oleh adanya dendam lama pada masa penjajahan kolonial Belanda di Cilegon yaitu pada peristiwa Geger Cilegon. peristiwa tersebut dipicu oleh kebijakan para kolonial Belanda serta pelarangan adzan yang kemudian menimbulkan pemberontakan dan akhirnya banyak memakan korban yang didominasi oleh para ulama. Selain itu faktor lainnya adalah perjanjian antara para ulama di Cilegon dengan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974 kemudian memunculkan klausul tak ada tempat ibadah agama lain selain Islam di Cilegon. Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasa intoleransi masih cukup kuat di Cilegon. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun masih ditemukan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di kota ini.

KATA KUNCI: Agama, Cilegon, Intoleransi, Rumah Ibadah

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman agama dan budaya. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, di tengah keberagaman ini, masih terdapat kasus-kasus intoleransi agama yang terjadi di Indonesia.

Intoleransi agama adalah sikap atau perilaku diskriminatif yang dilakukan terhadap kelompok agama tertentu. Intoleransi agama dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, pengusiran, penghinaan, dan diskriminasi dalam akses ke layanan publik atau pekerjaan. Kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap umat agama tertentu.

Kasus intoleransi dalam beragama bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, akan tetapi juga menjadi permasalahan global. salah satu permasalahan intoleransi yang sering dibahas adalah fenomena Islamophobia. Fobia terhadap Islam telah menjadi topik yang mendominasi dalam konteks rasisme budaya terhadap orang Arab. Kejadian 9/11 telah meningkatkan sentimen anti-Arab melalui penyebaran Islamophobia yang meluas di seluruh dunia, yang mengasumsikan orang Arab dan Muslim sebagai teroris. (wulandari & dwi, n.d.,)

Sikap intoleransi beragama di Indonesia juga bisa dikatakan cukup banyak untuk sebuah negara yang memiliki kebebasan beragama. mayoritas kasus tersebut adalah kasus perusakan rumah ibadah, dengan total sebanyak 7 kasus. Jumlah itu pun disusul dengan kasus larangan mendirikan tempat ibadah serta larangan beribadah, yang masing-masing berjumlah 5 kasus (gatra.com, 2022). Selain tiga jenis pelanggaran yang disebutkan, Imparsial juga mencatat terdapat tiga insiden pelanggaran yang terjadi di Indonesia yang melibatkan perusakan atribut keagamaan. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus lain yang muncul akibat adanya intoleransi, seperti serangan terhadap

keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda, penutupan paksa tempat ibadah, dan juga pengucilan dalam masyarakat. (gatra.com, 2022)

Kasus intoleransi di Indonesia yang penulis sorot adalah pada Kota Cilegon. Berdasarkan data dari banten.nu.or.id, Kota Cilegon memiliki persentase agama sebesar Islam 97%, Katolik sebesar 0,77%, Protestan sebesar 0,84% Hindu sebesar 0,26 % dan Budha sebesar 0,16%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa agama mayoritas pada Kota Cilegon adalah Agama Islam. Berbagai permasalahan agama pernah terjadi pada kota tersebut diantaranya adalah permasalahan pengrusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di kompleks perumahan PCI (Pondok Cilegon Indah) Cilegon, yang dipakai untuk Sekolah Minggu anak-anak pada tanggal 10 April. Kejadian itu dilatarbelakangi dengan perayaan Paskah pada hari Minggu 11 April pukul 17.00 WIB (Hardian, 2015 (Kanwil Banten, 2022)). Paskah dilakukan di kompleks mengingat anak-anak tidak mungkin pergi sendiri-sendiri ke kota Cilegon yang jaraknya kurang lebih 30 km. dengan gereja HKBP Cilegon dari kompleks PCI. Padahal, sebelumnya selama kurang lebih 2 tahun, kegiatan sekolah Minggu di tempat ini tidak pernah dipermasalahkan. Kemudian masih banyak lagi permasalahan antar agama yang terjadi di Kota Cilegon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja”. Dengan tujuan untuk menumbuhkan Kembali rasa toleransi dan menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di kota lainnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam topik yang diteliti dan menggambarkan fenomena yang terkait dengan topik tersebut. Penulis menggunakan metode studi pustaka untuk

mengumpulkan data dari portal berita online. Metode studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan sumber data dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 2008). Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang akan difokuskan terhadap penyebab mengapa dan bagaimana warga Cilegon dapat bersifat Intoleransi. Pembacaan akan dilakukan secara teliti serta tidak akan mengantisipasi temuan.

Data yang telah diseleksi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif memiliki tujuan khusus yang berfokus terhadap pertanyaan siapa, apa, bagaimana dan dimana suatu peristiwa terjadi sehingga dapat disampaikan secara jelas, terperinci dan sistematis. (Kim, 2018). Setelah melakukan analisis terhadap data tersebut penulis akan menyusun dan menyampaikan argumen serta membuat kesimpulan terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah artikel-artikel berita yang diambil dari portal berita online. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan menggali informasi terkait dengan topik penelitian yang dijadikan dasar untuk menyusun argumen dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengidentifikasi sumber data yang relevan dan valid. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai database akademik dan perpustakaan online, seperti Google Scholar, dan sumber dari laman berita online. Sumber data juga diambil dari berbagai buku dan jurnal ilmiah terkait dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Kriteria inklusi meliputi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, publikasi dalam jangka waktu tertentu, dan publikasi dalam bahasa Inggris. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi sumber literatur yang tidak relevan dengan topik penelitian, publikasi yang tidak diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, dan publikasi dalam bahasa selain Inggris. Proses seleksi sumber data dilakukan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan seleksi, sumber data yang memenuhi kriteria diambil untuk dilakukan analisis. Sumber data yang tidak memenuhi kriteria akan diabaikan.

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang akan difokuskan terhadap penyebab mengapa dan bagaimana warga Cilegon dapat bersifat Intoleransi. Pembacaan akan dilakukan secara teliti serta tidak akan mengantisipasi temuan. Data yang telah diseleksi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif memiliki tujuan khusus yang berfokus terhadap unsur - unsur dasar pertanyaan seperti siapa, apa, bagaimana dan dimana suatu peristiwa terjadi, sehingga dapat disampaikan secara jelas, terperinci dan sistematis. (Kim, 2018). Setelah melakukan analisis terhadap data tersebut penulis akan menyusun dan menyampaikan argumen serta membuat kesimpulan terkait dengan topik penelitian.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Sikap Toleransi

Sikap intoleransi adalah kecenderungan untuk tidak menerima atau menghormati perbedaan atau pandangan yang berbeda. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengakui kasus intoleransi di Indonesia setiap waktunya mengalami peningkatan. Menurutnya salah satu yang mendominasi kasus intoleransi adalah pendirian rumah ibadah yang sangat sulit dan hak-hak minoritas (bpip.go.id, 2020). Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu kota yang dikenal memiliki masalah intoleransi adalah Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang sikap intoleransi di Cilegon, serta dampak dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Sikap intoleransi di Cilegon adalah sebuah fenomena sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sikap intoleransi di Cilegon meliputi perilaku diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok minoritas seperti agama, suku, ras, dan orientasi seksual. Sikap intoleransi di Cilegon berdampak negatif terhadap harmoni sosial dan dapat memicu konflik antar kelompok yang berbeda, serta menghambat perkembangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut Oleh karena itu, upaya pencegahan dan

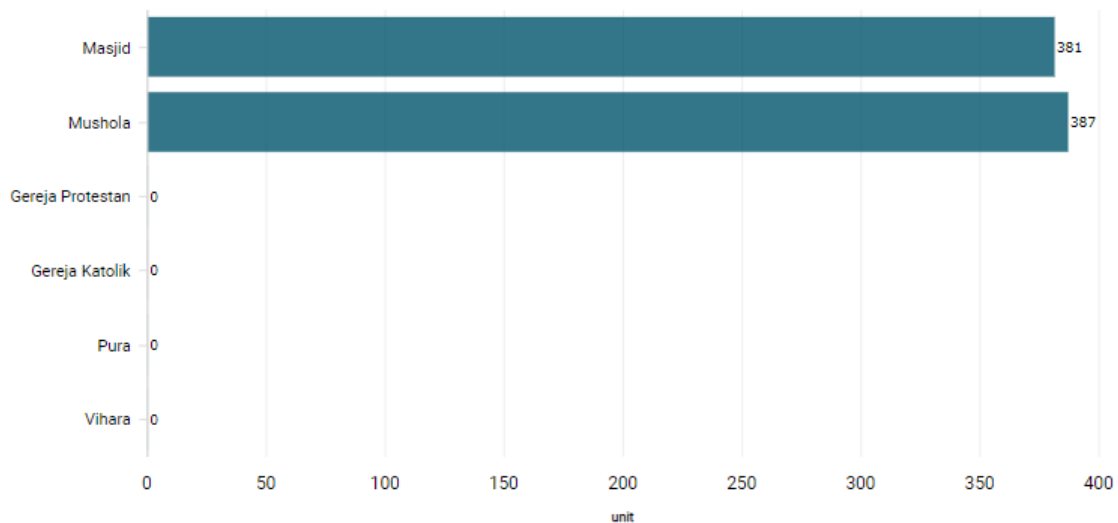
penanggulangan sikap intoleransi perlu dilakukan secara terus-menerus dan komprehensif, melalui pendekatan yang mengedepankan dialog antar kelompok dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan mengatasi perbedaan yang ada, serta melalui peningkatan literasi dan edukasi yang mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat setempat perlu berperan aktif dalam mengembangkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keragaman dan keberagaman serta mendorong pengembangan sikap inklusif dan menghargai perbedaan.

Sejak beberapa tahun terakhir, Cilegon menjadi sorotan karena adanya tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di dalamnya. Beberapa contoh tindakan intoleransi yang terjadi di Cilegon antara lain adalah penolakan pendirian gereja, penolakan pemakaman non-muslim di pemakaman umum, serta penolakan kegiatan keagamaan yang berbeda dengan mayoritas penduduk. Kasus-kasus seperti ini bukan hanya merugikan kelompok minoritas, tetapi juga merusak citra Cilegon sebagai kota yang toleran.

B. Data Rumah Ibadah di Cilegon

Rumah ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tempat untuk beribadah dan berinteraksi sosial, rumah ibadah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Cilegon adalah salah satu kota di Banten yang memiliki keragaman agama. Mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat pula warga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai warga yang beragam agama, keberadaan rumah ibadah menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Namun, penulis mendapatkan dari website databoks.katadata.co.id pada September 2022 menyebutkan bahwa pada tahun 2021, tidak ada tempat ibadah untuk umat nonmuslim di Kota Cilegon. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat di Cilegon, terutama bagi warga nonmuslim yang membutuhkan tempat ibadah yang sesuai

dengan agama dan keyakinan mereka. Berikut data yang penulis ambil dari website databoks.katadata.co.id



Jumlah Rumah Ibadah di Cilegon berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id tahun 2021

Berdasarkan data dari gambar diatas, diketahui bahwa pada kota Cilegon sampai tahun 2022 hanya memiliki rumah ibadah untuk umat muslim saja, sedangkan untuk rumah ibadah lain seperti gereja protestan, katolik, pura dan vihara masih belum ada di Cilegon. Ketidakadanya tempat ibadah untuk umat nonmuslim di Kota Cilegon pada tahun 2021 tentu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menjamin bahwa seluruh warga Cilegon memiliki akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, tanpa terkecuali.

C. Penolakan Gereja di Cilegon

Sekelompok warga di Cilegon, Banten, melakukan aksi protes menolak pembangunan gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon. Menanggapi aksi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menggelar pertemuan dengan perwakilan HKBP Maranatha Cilegon untuk menyelesaikan

persoalan tersebut (Kanwil Banten, 2022). Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kanwil Banten, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten, Syaiful Anwar, mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari HKBP Maranatha Cilegon untuk membicarakan masalah tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi yang tepat agar pembangunan gereja dapat berlangsung tanpa menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

Dalam pertemuan tersebut, Syaiful Anwar menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam hal ini, pihak Kemenkumham Banten bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, aksi penolakan terhadap pembangunan gereja tidak hanya terjadi di Cilegon, tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas seperti umat Kristen Protestan. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia berusaha untuk mempromosikan toleransi antaragama dan mendorong dialog antarumat beragama melalui program-program seperti Gerakan Indonesia Sadar Beragama (Gisar) dan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).

Dalam konteks ini, apa yang terjadi di Cilegon adalah sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Menurut Komnas HAM, aksi penolakan terhadap pembangunan gereja merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Komnas HAM, penolakan tersebut dianggap sebagai "diskriminasi terhadap agama tertentu dan penolakan

terhadap hak atas kebebasan beragama.". Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan yang cukup bagi kelompok minoritas, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mempromosikan toleransi antaragama dan mendorong dialog antarumat beragama. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok agama, termasuk kelompok minoritas seperti umat Kristen Protestan. Dalam hal ini, Kemenkumham Banten dan Kemenag Indonesia harus berperan aktif untuk memfasilitasi dialog antara warga dan gereja terkait pembangunan gereja tersebut. Dalam dialog ini, warga dan gereja dapat membahas masalah yang muncul dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

D. Penyebab Sikap Intoleransi di Cilegon

Sikap intoleransi di Cilegon ini konon katanya berasal dari “dendam” lama warga Cilegon pada saat terjadinya peristiwa Geger Cilegon. Mengutip dari laman berita online detik.com, Sekretaris FKUB Cilegon mengatakan bahwa “Tentu kita juga melihat sisi historisnya masyarakat, historis itu kurang lebih tahun (1888) dikenal dengan Geger Cilegon yang mendasari terjadinya Geger Cilegon itu adalah karena adanya pelarangan azan kemudian pengambilan paksa atau upeti terhadap masyarakat kemudian terjadinya penggusuran terhadap masyarakat atau pribumi yang notabene hampir 100 persen adalah muslim, pada akhirnya terjadilah pergolakan, waktu itu jihad lah ya yang dipimpin oleh Kiai Wasyid ” (Detik.com, 2022).

Peristiwa Geger Cilegon ini merupakan salah satu pemberontakan besar oleh tani terbesar yang terjadi pada tanggal 09 Juli 1888 setelah pembubaran Kesultanan Banten 1813 oleh VOC. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh musibah kekeringan yang berlangsung lama mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan terjadi wabah penyakit pes. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah kolonial memerintahkan pengambilan tindakan ekstrim dengan memberlakukan

pemusnahan seluruh ternak, termasuk binatang yang tidak terinfeksi penyakit. Hal ini merupakan salah satu penyebab kemarahan awal masyarakat Cilegon, karena kolonial Belanda dianggap telah melakukan perbuatan yang keji dan seenaknya. Selain itu, kesengsaraan rakyat semakin berat dikarenakan terjadinya musibah yang datang terus menerus, musibah tersebut juga meliputi meletusnya gunung Krakatau yang banyak memakan korban jiwa hingga kerusakan alam. Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh kolonial Belanda. Bukan hanya itu, kolonial Belanda juga sempat melarang mengumandangkan Adzan karena dianggap berisik dan mengganggu, kemudian pengambilan paksa atau upeti terhadap masyarakat kemudian terjadinya pengusuran terhadap masyarakat atau pribumi yang notabene hampir 100 persen adalah muslim Oleh sebab itulah kemarahan para masyarakat tidak dapat dibendung lagi dan memicu terjadinya pemberontakan.

Pemberontakan ini dipelopori oleh para ulama dan masyarakat setempat. Pasca pemberontakan ini banyak para ulama dan tokoh agama yang diasingkan hingga dieksekusi mati dengan cara dihukum gantung. hal inilah yang memicu terjadinya rasa intoleransi yang berkembang di Cilegon. Hal lainnya yang mendasari terjadinya sikap intoleransi yang cukup tinggi di Cilegon hingga saat ini. Alasan lain terjadinya sikap intoleransi ini adalah adanya perjanjian antara Perusahaan Krakatau Steel dengan para ulama yang ada di Cilegon. yang mana pada perjanjian tersebut melarang Krakatau Steel untuk mendirikan rumah ibadah lain selain rumah ibadah umat muslim di Cilegon. FKUB Cilegon juga mengatakan bahwa “kurang lebih tahun 1974-1978 ada yang namanya projects Trikor, projects pembangunan baja Krakatau Steel pada saat itu kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah ada kesepakatan antara para alim ulama khususnya pesantren Al-Khairiyah waktu itu dan juga tokoh-tokoh masyarakat bersedia untuk direnovasi atau sekarang lebih tepatnya bedol desa dengan catatan tidak ada tempat ibadah lain” (Kompas.com, 2021).

E. Solusi permasalahan Intoleransi yang Sudah dilakukan di Cilegon

Sudah begitu banyak permasalahan terkait intoleransi yang terjadi di daerah cilegon. Sehingga, banyak solusi yang diupayakan untuk meredam maupun mengurangi sikap intoleransi tersebut. Mulai dari pemerintah yang ikut turun menegur walikota dari daerah Cilegon hingga Ormas yang membuat dialog antar umat beragama agar dapat saling mengerti. Penulis menemukan solusi dari berbagai referensi yang membahas terkait kasus intoleransi di daerah Cilegon.

Penulis akan memulai membahas solusi yang diupayakan oleh pemerintah terlebih dahulu yang kemudian akan dilanjutkan dengan upaya - upaya yang dilakukan oleh Ormas di daerah Cilegon. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menjaga keberagaman serta kerukunan antar umat beragama di daerah Cilegon. Selain itu pemerintah juga tengah melakukan pembaharuan pola pikir masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah Cilegon. Pembaharuan pola pikir masyarakat merupakan suatu hal penting untuk dapat merubah suatu kebiasaan yang memang sudah terjadi selama bertahun - tahun. Tanpa adanya suatu pola pikir modern yang dimana akan berpikir lebih kritis serta memiliki pemikiran terbuka terhadap agama lainnya, maka perwujudan untuk tercapainya kerukunan antar agama di masyarakat Cilegon tidak akan terwujud (Sarhini, 2022, 145).

Kemajuan pola pikir di daerah Cilegon memang sangat diperlukan, namun semua hal ini tidak dapat terjadi jika memang tidak didorong oleh pemerintahan kota Cilegon. Pemerintahan yang sedang berjalan di kota Cilegon haruslah bersifat netral tidak mendukung pihak manapun dan harus selalu memastikan bahwa setiap umat beragama mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan ritual peribadatan mereka. Bahkan Kepala Daerah Cilegon sampai harus ditegur oleh lembaga pemantau hak asasi manusia untuk tidak mengistimewakan suatu kelompok tertentu dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang berada di daerah tersebut. Namun, dari semua itu kita dapat melihat bahwasanya terdapat usaha dari pemerintah untuk mengurangi sikap intoleransi yang terjadi di Cilegon dengan cara menegur Kepala Daerah Cilegon. (kompas.com, 2022).

Selain peneguran terhadap pemerintahan di Kota Cilegon. Pemerintahan pusat juga mengusahakan peraturan - peraturan yang memang tidak seharusnya ada dan bersifat sewenang - wenang untuk dihilangkan. Masyarakat di Kota Cilegon memanfaatkan peraturan yang seharusnya tidak dibenarkan oleh undang - undang untuk melakukan penolakan pendirian rumah peribadatan. Banyak nya peraturan yang bersifat diskriminatif serta diikuti oleh pemerintahan daerah yang sama sekali tidak didengar bahkan berpengaruh di masyarakat membuat kaum minoritas semakin kesulitan untuk mendapatkan hak mereka (Riansyah, n.d., 49).

Pemerintah pusat juga melakukan gerakan - gerakan untuk dapat melakukan penurunan tingkat intoleransi di Indonesia. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan sikap intoleransi yang belakangan ini semakin marak terjadi. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah gerakan yang memiliki fokus utama untuk merubah bagaimana cara seseorang dalam memandang sesuatu, cara pikir, serta perilaku. Gerakan ini memiliki dasar yang sangat kuat dengan Pancasila dan menekankan pada tiga nilai penting serta memiliki nilai strategi instrumental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Maka dengan memfokuskan hal tersebut sekiranya sikap intoleransi masyarakat yang berada di daerah Cilegon dan tempat lainnya dapat berkurang. Selain itu juga, jika memang terjadi sesuatu seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah yang terdapat di Cilegon sudah bertentangan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental, khususnya pada program ke lima. Program kelima berisikan mengenai Indonesia bersatu, yang tentunya program ini lebih berfokus terhadap keberagaman yang terdapat di Indonesia untuk mendukung terwujudnya suatu kehidupan demokrasi pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter antar umat beragama serta yang terpenting adalah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal dan berkebutuhan khusus (Anugerah, n.d., 3).

Jika kita membahas terkait intoleransi yang terjadi di daerah Cilegon maka kita tidak akan lepas dengan sebutan PBNU. PBNU merupakan

singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU merupakan salah satu pelopor solusi untuk permasalahan intoleransi di Cilegon. Meskipun PBNU tidak termasuk organisasi yang didirikan langsung oleh pemerintah, namun organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dalam beberapa hal. Pada saat ini kepemimpinan PBNU dipegang oleh Gus Yahya (kumparan.com, 2021). PAC GP kota Ansor kota Cilegon berharap pada kepemimpinan Gus Yahya untuk dapat mendorong masyarakat melawan sifat intoleransi yang masif. Setelah terselenggaranya Mukhtar Nahdlatul Ulama ke -34, warga NU dan Ansor kota Cilegon berhasil untuk mempertahankan usaha nya dalam menurunkan sikap intoleransi yang berada di kota Cilegon (nuonline, 2021).

Selanjutnya penulis akan membahas upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Ormas, salah satunya yaitu menggagalkan aksi demo yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2022. Surat undangan aksi penolakan pembangunan gereja di Cilegon sudah dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022 oleh organisasi massa Masyarakat Banten bersatu (ormas MBB). Sebelumnya telah terjadi keributan yaitu terjadi pembongkaran pagar sengketa di lahan tempat akan dibangunnya gereja Jemaat Kristen HKBP. Demo tersebut akhirnya dibatalkan karena adanya mediasi dari beberapa pihak yaitu Walikota Cilegon Helldy Agustian, Ketua DPRD Cilegon, Ormas MBB, dan perwakilan Kementerian Agama. Setelah melakukan mediasi, akhirnya pihak tersebut memutuskan tiga hal. Pertama, MBB harus membatalkan aksi demo pada 25 April 2022. Kedua, pembangunan gereja dibatalkan karena belum melengkapi surat perizinan yang diminta. Ketiga, Ormas MBB harus mendukung penuh apabila perizinan pembangunan gereja sudah memenuhi persyaratan.

Meskipun demo penolakan tersebut digagalkan, pembangunan gereja tetap dibatalkan. tindakan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Cilegon masih memiliki sikap intoleransi yang kuat. Seharusnya Pemkot Cilegon memberi izin pembangunan gereja untuk memfasilitasi kebebasan beribadah antar umat beragama. Kebebasan beragama termasuk dalam salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi dan diakui

secara internasional terutama di Indonesia. Kelompok intoleran tidak memiliki alasan untuk mencegah pembangunan gereja atau tempat ibadah lainnya.

Pemerintah harus bertindak tegas untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa terkecuali, intoleransi dan diskriminasi terhadap agama minoritas terus terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan tindakan tersebut harus segera dihentikan. Penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan beragama dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari nilai-nilai inti demokrasi negara.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasa intoleransi masih cukup kuat di Cilegon. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun masih ditemukan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di kota ini. Rasa intoleransi ini ditandai dengan adanya penolakan pendirian rumah ibadah terutama gereja di kota Cilegon. Selain itu, menurut data yang penulis temukan tidak ada rumah ibadah lain selain dari musholla dan masjid. Menanggapi hal tersebut, sudah banyak solusi yang diupayakan oleh pemerintah serta organisasi masyarakat dalam menekan tingkat intoleransi tersebut. Menurut penuturan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon, penyebab terjadinya rasa intoleransi di Cilegon adalah karena adanya peristiwa Geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888 yang mana pada peristiwa tersebut dipicu oleh kebijakan para kolonial Belanda serta pelarangan adzan yang kemudian menimbulkan pemberontakan dan pada akhirnya banyak memakan korban jiwa yang sebagian besar dialami oleh para ulama. Selain itu faktor lain terjadinya sikap intoleransi di Cilegon adalah perjanjian antara para ulama di Cilegon dengan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974. memunculkan perjanjian antara ulama, tokoh masyarakat dengan pihak berwenang yang kemudian memunculkan klausul tak ada tempat ibadah agama lain selain Islam di Cilegon. Dalam upaya nya pemerintah melakukan

berbagai macam cara yaitu menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama di Cilegon, serta melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya toleransi dan memajukan pola pikir masyarakat di Cilegon. Tidak hanya itu pemerintah pusat juga melakukan gerakan untuk menurunkan tingkat intoleransi di Indonesia, seperti Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menekankan pada tiga nilai penting serta program keberagaman untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi Pancasila yang di mana salah satu nilainya adalah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas.

DAFTAR REFERENSI

- Anugerah, B. (2021). Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), 3.
https://www.researchgate.net/publication/354376194_Pembinaan_Gerakan_Nasional_Revolusi_Mental_GNRM
- Arifianto, A. (2019). Religious intolerance and the challenge of pluralism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 401-422.
- bpip.go.id. (2020, December 18). BPIP: Kasus Intoleransi di Indonesia Selalu meningkat. BPIP. Retrieved March 21, 2023, from <https://bpip.go.id/berita/1035/352/bpip-kasus-intoleransi-di-indonesia-selalu-meningkat.html>
- Detik.com. (2022, September 11). FKUB Ungkap 3 Hal Ini Jadi Alasan Adanya Penolakan Gereja di Cilegon. detikNews. Retrieved May 12, 2023
- gatra.com. (2022, November 17). Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022 | Nasional. Gatra.com. Retrieved May 21, 2023, from <https://www.gatra.com/news-558269-nasional-imparsial-catat-25-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022.html>
- gerakanpis.id. (2022, Mei 10). Kelompok Intoleran di Kota Cilegon, Tolak Pembangunan Gereja. PERGERAKAN INDONESIA UNTUK SEMUA. Retrieved Maret 23, 2023, from <https://gerakanpis.id/kelompok-intoleran-di-kota-cilegon-tolak-pembangunan-gereja/>
- Hardian. (2015, September). DIALOG UMAT ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA CILEGON BANTEN. DIALOG UMAT ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA CILEGON BANTEN, 7(2).
<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/26/21>
- Kanwil Banten. (2022, September 14). Kasus Penolakan Gereja di Cilegon. Kemenkumham Banten. Retrieved March 17, 2023, from

<https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9069-kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenkumham-banten-temui-perwakilan-hkbp-maranatha-cilegon>

Kim, H. (2018, February 1). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. NCBI. Retrieved May 11, 2023, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225027/>

Kompas.com. (2021, June 29). Geger Cilegon 1888: Latar Belakang dan Jalannya Perang Halaman all. Kompas.com. Retrieved May 11, 2023, from <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/29/110000579/geger-cilegon-1888-latar-belakang-dan-jalannya-perang?page=all>

Kompas.com. (2021, Mei 26). Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenkumham Banten Temui Perwakilan HKBP Maranatha Cilegon. Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenkumham Banten Temui Perwakilan HKBP Maranatha Cilegon. Retrieved March 16, 2023, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/123536065/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-kemenkumham-banten-temui-perwakilan>.

kompas.com. (2022, September 11). Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas. Kompas.com. Retrieved March 21, 2023, from <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>

Kompas.tv. (2022, March 31). Riset Setara Institute: Depok Kota Paling Intoleran di Indonesia Tahun 2021. Kompas TV. Retrieved March 21, 2023, from <https://www.kompas.tv/article/275445/riset-setara-institute-depok-kota-paling-intoleran-di-indonesia-tahun-2021>

kumparan.com. (2021, December 24). Tentang Nahdlatul Ulama: Ini Beda Rais Akbar, Rais 'Aam, dan Ketua Umum PBNU. Kumparan. Retrieved March 24, 2023, from <https://kumparan.com/lampunggeh/tentang-nahdlatul-ulama-ini-beda-rais-akbar-rais-aam-dan-ketua-umum-pbnu-1xAk8YVgbq8>

- Kusnandar, V. B. (2022, September 12). Tidak Ada Tempat Ibadah untuk Umat Nonmuslim di Kota Cilegon pada 2021. Databoks. Retrieved March 19, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/tidak-ada-tempat-ibadah-untuk-umat-nonmuslim-di-kota-cilegon-pada-2021>
- nuonline. (2021, December 29). Demografi Toleransi Rendah Di Kota Cilegon, Nukman: Ansor Hadir Sebagai Jawaban Dari Intoleransi. NU Online Banten. Retrieved March 24, 2023, from <https://banten.nu.or.id/banten-raya/demografi-toleransi-rendah-di-kota-cilegon-nukman-ansor-hadir-sebagai-jawaban-dari-intoleransi-RAfBr>
- Riansyah, A. (n.d.). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon, 3(1), 49. <https://scholar.archive.org/work/b6k7vsufzbhpba6yvq2sd3bvwwq/access/wayback/http://hk-publishing.id/ijd-demos/article/download/79/pdf>
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021, April 14). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon, 3(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Sarbini, P. B. (2022). Benturan-benturan Misi Gereja Katolik. Benturan-benturan Misi Gereja Katolik, 32(31). <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/175/172>
- Satriawan, I. (2019). Tolerance and intolerance in Indonesia: The challenge of multiculturalism. *Journal of Humanities and Social Science Studies*, 1(1), 13-23.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.

- Syafi'i, M. A. (2018). Meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia melalui pendidikan. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1), 1-12.
- Yusuf, A. (2019). Religious intolerance in Indonesia: The case of Ahmadiyya. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 1-15.
- wulandari, & dwi. (n.d.). Politik Islamophobia di Prancis : Konsep dan Realitas. *Politik Islamophobia di Prancis : Konsep dan Realitas*.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30047>